

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH  
TERHADAP**

- 1. RANCANGAN QANUN TENTANG TATA CARA  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**
  - 2. RANCANGAN QANUN TATA CARA PENGALOKASIAN  
TAMBAHAN DANA HASIL MIGAS DAN DANA  
OTONOMI KHUSUS**
- 

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Wr, Wb.*

*Hamdan syukran Lillah . Salatan wa salaman 'ala Rasulillah wa 'ala alihi  
wa shahbihi wa mauwwalah.*

**Yang Terhormat,**

**Sdr. Gubernur Aceh.**

**Sdr. Ketua, para wakil ketua dan anggota DPR Aceh.**

**Sdr. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Kepala Biro, Kepala Dinas, Kepala  
Badan dan Lembaga Daerah, Kakanwil , Sekretaris Dewan beserta  
staff, Rekan-rekan Wartawan, hadirin dan hadirat yang kami  
muliakan.**

Dari lubuk hati yang dalam marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari ini kita telah diberikan kesempatan melaksanakan suatu tahapan kegiatan pemerintahan di Propinsi Aceh tercinta ini yaitu pembahasan dua rancangan qanun yaitu **Rancangan Qanun Aceh tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Rancangan Qanun Aceh Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.** Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW penghulu semua Rasul karena berkat perjuangan dan pengorbanan beliau telah mengantar ummat manusia ke alam peradaban mulia yang selalu dalam lindungan Allah SWT.

Sesuai dengan tata tertib dewan, seperti yang telah terjadwal dalam persidangan ini kami ingin menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi kami, Fraksi **PARTAI BULAN BINTANG** terhadap kedua rancangan qanun tersebut.

**Sidang Dewan yang terhormat.**

Mengawali penyampaian Pendapat Akhir Fraksi **PARTAI BULAN BINTANG** ini perkenankan kami mengucapkan Selamat Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1429 H semoga dengan semangat hijrah yang telah dicontohkan oleh Rasul dan para Sahabat, mari kita introspeksi diri kita masing-masing

apakah kita telah mengemban amanah sesuai dengan tuntutan tugas kita sebagai pemangku amanah dan telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk merubah keadaan dari hal yang tidak atau kurang baik kepada hal yang lebih baik. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi C dan PANSUS XI DPRA yang telah bekerja siang dan malam, tidak mengenal waktu dalam menyelesaikan tugasnya. Demikian juga ucapan yang sama kami sampaikan kepada Eksekutif yang telah memberikan tanggapan, jawaban serta penjelasan Sdr. Gubernur atas hasil pembahasan Komisi C dan PANSUS XI yang disampaikan pada masa persidangan sebelumnya.

Sepantasnya pula kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah ikut memperkaya materi pembahasan kedua rancangan qanun yang sedang dibahas, kesemuanya ini sangat membantu dan memudahkan fraksi kami, Fraksi **PARTAI BULAN BINTANG** dalam menyusun Pendapat Akhir Fraksi.

**Sidang Dewan yang terhormat.**

Sebelum fraksi kami, Fraksi **PARTAI BULAN BINTANG** menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi, kami ingin menyampaikan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan Pembangunan Aceh dalam upaya mengantarkan masyarakat

menuju hidup sejahtera sebagaimana cita-cita perjuangan para leluhur kita dimasa lampau.

**Sidang Dewan yang terhormat.**

Berbicara tentang Pembangunan Aceh, pada dasarnya kita berbicara masalah *harapan dan tuntutan masyarakat* terhadap Pemerintah Aceh yang merupakan amanah yang dititipkan melalui Pemilihan Umum Anggota Legislatif yang diselenggarakan pada April 2004 maupun Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Desember tahun 2006 yang baru lalu, oleh karena itu terhadap pembangunan didaerah ini perlu pencermatan yang maksimal sehingga tidak ada unsur pelayanan masyarakat yang tertinggal apa lagi terabaikan.

Melalui forum yang terhormat ini, kami ingin berbagi pemikiran terhadap hal-hal sebagai berikut:

**Pembangunan dibidang Ekonomi.**

Berbicara tentang ekonomi terbayang kepada kita akan kemakmuran dan kemiskinan. Kalau kita menoleh pada besarnya dana yang mengalir ke Aceh pasca konflik dan bencana alam sesungguhnya terbayang akan kesejahteraan

dan kemakmuran, akan tetapi bila mana kita melihat ke berbagai pelosok daerah yang kita jumpai hari ini adalah kemiskinan. Masa Rehab dan Rekon tinggal hanya dalam hitungan bulan. Berbagai harapan dan dambaan masyarakat mulai dari tempat tinggal, sarana dan prasarana umum masih banyak yang belum tersentuh terutama di daerah terpencil yang jauh dari pengamatan dan pengawasan. Demikian juga halnya dengan sektor ekonomi belum tersentuh secara komprehensif. Bantuan mengalir begitu banyak namun belum memberikan perubahan yang signifikan. Kondisi ini menurut pengamatan kami disebabkan oleh karena kurang sempurnanya perencanaan dimana suatu kegiatan kadang kala dilakukan hanya **sebatas menghabiskan anggaran**. Program pembangunan sering dilakukan tidak terfokus dan tidak tuntas sehingga sebarang anggaran yang dialokasikan hasilnya tidak maksimal. Paradigma pembangunan ekonomi yang pernah digagas yaitu mengembangkan potensi lokal yang merupakan andalan suatu daerah perlu dikembangkan. Penyusunan program harus komprehensif dan holistik sehingga begitu selesai pekerjaan sebuah program akan memberi makna kepada masyarakat. Program hulu dan hilir harus bersinerji, *sebagai contoh apa bila program pemberian bantuan boat kepada nelayan harus diikuti dengan bantuan lainnya berupa pembangunan cold storage untuk penyimpanan, pasar penampungan dan pengolahan hasil tangkapan mereka*. Tanpa keterpaduan pemberian bantuan tersebut hasilnya akan sia-sia.

Sebanyak apapun hasil tangkapan oleh nelayan apabila tidak dilakukan penyimpanan secara baik dan tidak tersedianya market hasilnya akan sia-sia. Program pembangunan yang dilaksanakan selama ini berupa program pembangunan yang "CILET-CILET" atau tidak terkonsep dan terencana dengan baik sehingga tidak pernah tuntas. Dalam contoh yang lain kami pernah menemukan sebuah kegiatan pembangunan embung yang dimulai pembangunannya tahun 2004 dan hingga hari ini masih terbengkalai, ironisnya lagi selama dua priode anggaran yaitu tahun 2006 dan 2007 kepada kegiatan tersebut tidak mendapat alokasi anggaran. Beginilah menurut pengamatan kami kondisi yang dikembangkan selama ini. Oleh karena itu belajar dari pengalaman dan kegagalan masa lalu kami mengajak Sdr. Gubernur beserta seluruh jajarannya untuk mengubah pola pembangunan dari konsep cilet-cilet kepada kosep yang **"Fokus, Berkesinambungan, melibatkan partisipasi masyarakat, Tuntas dan Bersineriji dalam lintas program"**.

Dari pengamatan kami di daerah bahwa terjadi kelesuan berusaha oleh masyarakat pada beberapa sektor komoditi karena tidak jelasnya aspek pasar dan penampungan. Pengalaman menunjukkan bahwa bilamana pasar dan penampung tersedia, masyarakat akan lebih giat lagi untuk berusaha. Contoh dapat kita lihat pada saat harga minyak nilam dikawasan Aceh Barat dan

Selatan beberapa tahun lalu tinggi karena memiliki pasar, masyarakat tanpa diberi rangsangan mereka berlomba-lomba mengolah tiap jengkal tanah di daerah tersebut. Demikian juga kondisi pada era tahun 70 dan 80- an dimana cengkeh memiliki pasar dan harga yang baik, masyarakat diberbagai daerah di Aceh Besar, Sabang dan Simeulue tanpa digerakkan mereka berlomba-lomba menggarap lahan untuk dijadikan kebun cengkeh dan waktu itu kemakmuran berada dipihak mereka. Contoh diatas menunjukkan bahwa **pasar perlu diciptakan** agar masyarakat terangsang untuk melakukan aktifitas ekonominya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mengajak Sdr. Gubernur beserta jajaran terkaitnya untuk melakukan terobosan-terobosan yang dapat menggerakkan urat nadi perekonomian masyarakat tersebut sesuai dengan unggulan potensi alam masing-masing wilayah, apakah perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan lain sebagainya dalam perfoma **"Fokus, Berkesinambungan, melibatkan partisipasi masyarakat, Tuntas dan Bersineriji dalam lintas program"**.

## **Pengawalan Teritorial Laut**

Sebagaimana sama-sama kita maklumi bahwa Propinsi Aceh memiliki garis pantai yang sangat panjang yaitu sekitar 16.660 km dan luas perairan laut sekitar 295.370 km<sup>2</sup> serta memiliki sekitar 119 pulau. Dari data tersebut menggambarkan bahwa Aceh memiliki kekayaan hasil laut yang sangat menjanjikan, suatu sumber daya alam yang tidak perlu diperbaharui dan tidak habis habisnya selama kita dapat menjaga alam laut kita dari pengrusakan. Namun hari ini kita mendengar bahwa kapal-kapal nelayan asing sering melakukan penangkapan ikan dalam wilayah perairan kita dan bahkan sering terjadi bentrok dengan nelayan lokal. Mereka mencuri kekayaan laut kita dengan alat dan teknologi yang sangat canggih. Disamping itu juga kita sering mendengar bahwa dilaut sering dilakukan pengeboman ikan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan laut dan dapat mengancam kehidupan biota laut sekaligus mengancam kehidupan para nelayan. Kondisi ini sering terjadi di bagian barat dan selatan Aceh. Melihat situasi ini kami mengajak Sdr. Gubernur untuk meningkatkan penjagaan laut dengan melibatkan pihak keamanan agar laut tidak dirusak dan hasil laut tidak dicuri. Berapa banyak hasil laut yang sudah dikuras oleh nelayan asing sementara masyarakat kita tetap hidup dalam kemiskinan. Sejalan dengan penjagaan wilayah laut tersebut kami juga ingin mengajak Sdr. Gubernur untuk memaksimalkan pemanfaatan

potensi kelautan tersebut sehingga masyarakat pesisir dan kepulauan yang selama ini masih tetap dalam kondisi kemiskinan, dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Sektor kelautan perlu diberdayakan karena dengan menggarap hasil laut untuk kesejahteraan tidak akan merusak lingkungan, tidak akan mempengaruhi iklim panas global sebagaimana kalau mengeksploitasi hutan untuk sumber perekonomian.

Agar masyarakat kita dapat memanfaatkan potensi kelautan secara maksimal perlu adanya upaya-upaya pengenalan tentang potensi kelautan yang kita miliki kepada masyarakat mulai dari usia dini melalui pendidikan. Untuk itu kami mengajak Sdr. Gubernur agar menambah mata pelajaran muatan lokal tentang kelautan dan perikanan di sekolah-sekolah sejak Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Dan sudah sepantasnya Universitas Syiah Kuala membuka Fakultas Kelautan dan Perikanan untuk mencetak kader-kader tenaga ahli dibidang tersebut.

Pengenalan tentang dasar-dasar kelautan ini sudah didahului oleh sebuah NGO bekerja sama dengan Yayasan Lamjabat di Kecamatan Peukan Bada dengan memberi pelajaran tambahan tentang dasar-dasar kelautan pada sebuah Sekolah Dasar di Ujung Pancu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.

## **Investasi.**

Beberapa waktu yang lalu kita disuguhkan berita di koran tentang kemelut antara PT. Semen Andalas Indonesia-Lafarge dengan masyarakat Kecamatan Lhoknga dan masyarakat Kecamatan Leupung yang berdampak pada berhentinya aktivitas pabrik. Kondisi ini sangat merugikan daerah dalam hal investasi. Para investor akan berpikir panjang untuk menanamkan modalnya di Aceh bilamana kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Aceh tidak mereka dapatkan. Untukantisipasi jangan timbul kejadian serupa dimasa akan datang, Pemerintah daerah diminta untuk proaktif memberi kenyamanan berinvestasi di Aceh, salah satu cara adalah dengan membentuk Lembaga Counselling Investasi Daerah yang bertugas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul atau yang mungkin dapat muncul antara investor dengan masyarakat. Kita jangan hanya pintar mengajak investor tapi tidak pintar memberi perlindungan dan kenyamanan investasi kepada mereka. Promosi yang sangat jelek buat daerah bilamana investor yang telah ada didaerah ini merasa tidak nyaman dan akan berbicara diluar tentang ketidaknyamanan mereka tersebut. Sebaliknya kalau kita dapat memanfaatkan investor yang telah ada di daerah ini untuk melakukan promosi di luar bahwa berinvestasi di Aceh adalah sangat nyaman dan menjanjikan, tentunya hal ini sangat efektif.

Dalam kesempatan ini kami menyarankan kepada Pemerintah agar dapat menyusun suatu konsep perlindungan dan pembinaan terhadap masyarakat lingkungan agar kehadiran investor di daerahnya tidak dipandang sebagai malapetaka akan tetapi sebaliknya bisa bermitra yang saling menguntungkan.

**Sidang Dewan yang terhormat.**

### **Penegakan Syariat Islam**

Menelusuri kembali pencanangan penegakan syariat Islam di Aceh yang telah dimulai beberapa tahun lalu, terjadi miris hati kita tatkala melihat Aceh hari ini dibandingkan dengan daerah lain. Tidak ada perbedaan yang signifikan tentang keIslaman yang telah kita kumandangkan membumi di Aceh dengan keIslaman yang dilaksanakan di daerah lain luar Aceh. Berbagai perilaku yang dilarang oleh Islam terjadi di daerah lain luar Aceh dan terjadi pula di daerah Aceh yang bersyariat Islam secara kaffah ini. Contoh selalu ada di depan mata, di berita media cetak yang tidak perlu kami angkat satu persatu. Perlu kita bertanya; apakah ini sebuah kegagalan kita dalam membangun umat ataukah masih sebatas proses perobahan, mari kita instropeksi kebijakan dan tindakan yang telah kita lakukan selama ini sehingga setelah sekian tahun kita canangkan penegakan syariat Islam di Aceh masih menemukan kejadian-kejadian yang sama seperti kejadian yang juga terjadi di daerah lain luar Aceh

yang tidak pernah mencanangkan penegakan syariat Islam. Kondisi ini membuat hati ini malu tatkala orang luar yang datang ke Aceh bertanya beginikah Syariat Islam yang ditegakkan secara kaffah di Aceh?. Kami menaruh apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah melalui Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh yang melakukan penertiban busana yang tidak Islami bahwa ada upaya yang dilakukan untuk tegaknya sebuah aturan, akan tetapi kami menilai tindakan ini merupakan tindakan-tindakan "CILET-CILET" yang tidak tuntas. Hal ini kami sampaikan bahwa pemakai busana terus dihimbau untuk tidak memakai busana yang tidak Islami sementara begitu masyarakat / remaja membeli pakaian di pasar-pasar yang mereka temui adalah pakaian-pakaian yang tidak islami tersebut. Akhirnya masyarakat bingung dimana penjual dengan leluasa dibiarkan menjual pakaian yang tidak islami sementara pemakai yang selalu mendapat razia. Inilah sebuah bentuk manajemen cilet-cilet yang tidak menggunakan rumus **"Fokus, Berkesinambungan, melibatkan partisipasi masyarakat, Tuntas dan Bersineriji dalam lintas program"**.

**Sidang Dewan yang terhormat.**

Akhirnya tibalah saatnya kami menyampaikan pendapat akhir fraksi kami, Fraksi **PARTAI BULAN BINTANG** terhadap dua Rancangan Qanun Aceh

yaitu **Rancangan Qanun Aceh tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Rancangan Qanun Aceh Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.**

**Sidang Dewan yang terhormat.**

Setelah fraksi kami, fraksi **PARTAI BULAN BINTANG** mencermati berbagai substansi maupun proses pembahasan oleh Panitia Khusus maupun Komisi Dewan yang didalamnya terlibat anggota Fraksi Partai Bulan Bintang dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi kami Fraksi **PARTAI BULAN BINTANG** dapat menerima kedua rancangan qanun tersebut untuk disahkan menjadi masing-masing qanun yaitu **Qanun Aceh tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Qanun Aceh Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh** setelah mendapat penyesuaian kalimat sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (1) , setelah fraksi kami, Fraksi **PARTAI BULAN BINTANG** menelaah kembali Rancangan Qanun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; kami sependapat dengan Sdr. Gubernur sebagai

- mana yang disampaikan dalam Jawaban/Penjelasan Gubernur yang didampai dalam Paripurna yang lalu.
2. Demikian juga terhadap Pasal 33 ayat (2) Rancangan Qanun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setelah fraksi kami, Fraksi **PARTAI BULAN BINTANG** menelaah kembali Rancangan Qanun tersebut; kami sependapat dengan Sdr. Gubernur sebagai mana yang disampaikan dalam Jawaban/Penjelasan Gubernur yang didampai dalam Paripurna yang lalu.
  3. Pasal 41 ayat (1) Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, fraksi kami, Fraksi **PARTAI BULAN BINTANG** berpendapat bahwa tetap diperlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri dan untuk itu kami sependapat dengan usulan Komisi C.
  4. Terhadap Pasal 5 ayat (2) Rancangan Qanun tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, dimana oleh PANSUS XI menambah kalimat ” setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRA dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari komisi terkait” setelah mencermati kembali substansi pasal 5 ayat (2) tersebut, fraksi kami, Fraksi **PARTAI BULAN BINTANG** sependapat dengan Rancangan Qanun yang diajukan oleh PANSUS XI.

5. Demikian juga dengan Pasal 7 ayat (2) Rancangan Qanun tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, yang diajukan oleh PANSUS XI, fraksi kami, Fraksi **PARTAI BULAN BINTANG** sependapat dengan PANSUS XI dimana kalimat "dan telah mendapat kesepakatan bersama dengan DPRK" masih diperlukan dan untuk itu fraksi kami, Fraksi **PARTAI BULAN BINTANG** tetap sependapat dengan PANSUS XI.
6. Menyangkut dengan Pasal 11 ayat (6) , Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (6), setelah mengkaji ulang maksud ayat tersebut, fraksi kami, Fraksi **PARTAI BULAN BINTANG** sependapat dengan usulan PANSUS XI.
7. Terhadap penyesuaian kalimat dengan penambahan kata "DANA" fraksi kami, Fraksi **PARTAI BULAN BINTANG** sependapat dengan Sdr. Gubernur.
8. Fraksi kami juga menyatakan sependapat dengan Komisi C, bahwa pemberian honor diluar Tunjangan Prestasi Kerja agar selayaknya ditiadakan mengingat pada pos ini banyak terjadi pemborosan anggaran dan mengurus APBA Provinsi NAD, untuk itu Fraksi kami menyampaikan bahwa pasal 53 tetap sebagaimana terdapat dalam

Raqan yang disampaikan oleh Komisi C yaitu Rancangan Qanun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Demikianlah Pendapat Akhir fraksi kami, Fraksi **PARTAI BULAN BINTANG** terhadap dua **Rancangan Qanun Aceh tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Rancangan Qanun Aceh Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh** kami sampaikan dalam forum yang terhormat ini, atas segala kekurangan kami mohon maaf dan kepada Allah SWT kami minta ampun serta berserah diri.

**Wabillahi taufiq walhidayah  
wassalammu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.**

**Banda Aceh, 17 Januari 2008.  
FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH  
PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

Ketua

Sekretaris

**H. A. Ridwan M. Dallah, SE.**

**Ir. Ikhwan MM.**

**Anggota:**

1. Drs. Rusli Abdussamad (Wakil Ketua)
2. Tgk. H. Ishak Kasim (Anggota)
3. Drs. Saifuddin Samin (Anggota)
4. M. Jamal Yunus, SH (Anggota)
5. Ir. Hamdani Hamid (Anggota)
6. Drs. Zulkarnen (Anggota)